



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.890, 2022

KEMENLU. Sistem Klasifikasi Keamanan.
Klasifikasi Akses Arsip Dinamis.

**PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN KLASIFIKASI AKSES ARSIP DINAMIS
KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan perlindungan terhadap keamanan dan akses arsip dinamis, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu pengaturan mengenai sistem klasifikasi keamanan dan penentuan hak akses terhadap arsip dinamis Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
- b. bahwa Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Kementerian Luar Negeri sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi, perkembangan hukum, dan teknologi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Klasifikasi Akses Arsip Dinamis Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia;

5. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
6. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 514);
7. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN KLASIFIKASI AKSES ARSIP DINAMIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
3. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.
4. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan Pencipta Arsip di lingkungannya.
5. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah kategori kerahasiaan informasi Arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat, dan

- perorangan.
6. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah kategori pembatasan akses terhadap Arsip berdasarkan kewenangan penggunaan Arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
 7. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi Arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
 8. Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
 9. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia/lembaga pemerintahan.
 10. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.
 11. Sangat Rahasia adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau keselamatan bangsa.
 12. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
 13. Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang berkedudukan di luar negeri dan/atau dalam negeri untuk secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia pada negara penerima dan/atau pada organisasi internasional PBB dan non-PBB.
 14. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
 15. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi publik berupa penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di Kementerian dan Perwakilan.
 16. Pengguna Internal adalah pejabat dan/atau pegawai yang menggunakan Arsip dan berasal dari lingkungan Kementerian dan Perwakilan.

17. Pengguna Eksternal adalah pihak yang menggunakan Arsip dan berasal dari luar Kementerian dan Perwakilan.

Pasal 2

- (1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Klasifikasi Akses Arsip Dinamis Kementerian dan Perwakilan dimaksudkan untuk:
- mendorong Unit Pengolah agar memberkaskan Arsip Dinamis secara tertib, disertai dengan daftar Arsip aktifnya;
 - memberikan petunjuk kepada Unit Pengolah agar dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap Klasifikasi Keamanan dan Klasifikasi Akses Arsip Dinamis yang telah ditetapkan;
 - melindungi fisik dan informasi Arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas, dan keandalan Arsip dapat tetap terjaga; dan
 - melindungi Arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan Arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.
- (2) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Klasifikasi Akses Arsip Dinamis Kementerian dan Perwakilan bertujuan untuk:
- menjadi acuan pelaksanaan dalam pengelolaan Arsip Dinamis;
 - menyediakan layanan informasi Arsip Dinamis kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, biaya ringan, dan aman;
 - menyediakan informasi Arsip Dinamis yang dikategorikan Biasa/Terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi publik;
 - menjamin keamanan Arsip bagi informasi yang dikecualikan; dan
 - menciptakan kenyamanan bekerja bagi seluruh pegawai.

Pasal 3

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Klasifikasi Akses Arsip Dinamis Kementerian dan Perwakilan mencakup:

- Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis;
- Klasifikasi Akses Arsip Dinamis; dan
- Pengamanan Arsip Dinamis.

BAB II

KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN KLASIFIKASI AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 4

- (1) Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis dan Klasifikasi Akses Arsip Dinamis Kementerian dan Perwakilan didasarkan pada kategori kerahasiaan informasi yang

terdiri atas:

- a. Sangat Rahasia;
 - b. Rahasia;
 - c. Terbatas; dan
 - d. Biasa/Terbuka.
- (2) Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis dilakukan dengan ketentuan semakin tinggi tingkat kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tingkat pengamanan semakin tinggi.
 - (3) Klasifikasi Akses Arsip Dinamis dilakukan dengan ketentuan semakin tinggi tingkat kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semakin ketat pengaturan akses bagi pengguna Arsip Dinamis.

Pasal 5

- (1) Klasifikasi Keamanan dan Klasifikasi Akses Arsip Dinamis Kementerian dan Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
 - a. Klasifikasi Keamanan dan Klasifikasi Akses Arsip Dinamis fasilitatif; dan
 - b. Klasifikasi Keamanan dan Klasifikasi Akses Arsip Dinamis substantif.
- (2) Arsip Dinamis fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Arsip dalam kegiatan yang menghasilkan produk administratif atau penunjang dari tugas yang dilakukan di kesekretariatan.
- (3) Arsip Dinamis substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Arsip dalam kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan pokok Pencipta Arsip yang membedakan antara Pencipta Arsip yang satu dengan yang lain.
- (4) Klasifikasi Keamanan dan Klasifikasi Akses Arsip Dinamis fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Klasifikasi Keamanan dan Klasifikasi Akses Arsip Dinamis substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENGGUNA ARSIP DINAMIS

Pasal 6

Arsip Dinamis Kementerian dan Perwakilan dapat diakses oleh:

- a. Pengguna Internal; dan
- b. Pengguna Eksternal.

Pasal 7

- (1) Pengguna Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
 - a. Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri;
 - b. kepala Perwakilan;
 - c. pimpinan tinggi madya;
 - d. pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan kepala unit pelaksana teknis;
 - e. pejabat pengawas;
 - f. pejabat fungsional;
 - g. pengawas internal;
 - h. Arsiparis; dan
 - i. PPID.
- (2) Pengguna Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip Dinamis yang berada di bawah kewenangan masing-masing Pengguna Internal sesuai struktur organisasinya.
- (3) Pengguna Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diberikan hak akses untuk Arsip Dinamis pada Pengguna Internal Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kecuali telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang atas Arsip Dinamis tersebut.
- (4) Pengguna Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f tidak diberikan hak akses untuk Arsip Dinamis pada tingkat Pengguna Internal dengan jabatan lebih tinggi, kecuali telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang atas Arsip Dinamis tersebut.
- (5) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat mengakses seluruh Arsip Dinamis pada Pencipta Arsip Dinamis dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip Dinamis pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diberikan hak akses atas Arsip Dinamis dalam melakukan penyampaian informasi publik.

Pasal 8

- (1) Pengguna Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
 - a. publik;
 - b. pengawas eksternal; dan
 - c. aparat penegak hukum.
- (2) Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

mempunyai hak untuk mengakses informasi dari Arsip Dinamis dengan tingkat kerahasiaan informasi kategori Biasa/Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip Dinamis pada Pencipta Arsip untuk melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai hak untuk mengakses Arsip Dinamis pada Pencipta Arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya untuk melaksanakan fungsi penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGAMANAN ARSIP DINAMIS

Pasal 9

Pengamanan Arsip Dinamis Kementerian dan Perwakilan bertujuan untuk menjadi acuan pembatasan akses yang digunakan oleh penyedia informasi.

Pasal 10

- (1) Pengamanan Arsip Dinamis Kementerian dan Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan terhadap Arsip konvensional dan Arsip elektronik.
- (2) Pengamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Arsiparis di Unit Pengolah dan unit kearsipan.
- (3) Dalam hal belum tersedia Arsiparis pada Unit Pengolah dan unit kearsipan, pimpinan tinggi pratama dapat menugaskan pegawai pada unit kerja untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pelaksana arsip.
- (4) Ketentuan mengenai pengamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1284), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2022

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RETNO L. P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN KLASIFIKASI AKSES ARSIP DINAMIS
KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN KLASIFIKASI AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF
KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

NO. URUT	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	AKSES PENGUNA INTERNAL	DAKAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
I. PERENCANAAN					
	Pengumuman Rencana Kerja Rencana Pelaksanaan Jangka Panjang (RPJN)	Terbuka	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungsiwan, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Perencanaan dan Organisasi
	Rencana Pelaksanaan Jangka Menengah				
	Pengumuman Program Kerja Tahunan Usulan Unit Kerja beserta Data Pendukung	Terbuka	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungsiwan, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Perencanaan dan Organisasi
	Program Kerja Tahunan Unit Kerja				
	Program Kerja Tahunan Instansi				
	Pengumuman Rencana Kinerja Tahunan Rencana Kerja Unit Kerja				
	Rencana Kerja Instansi	Terbuka	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungsiwan, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Perencanaan dan Organisasi
	Pengumuman Perjanjian Kinerja Pengumuman Laporan				
	Laporan Mingguan	Terbuka	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungsiwan, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Perencanaan dan Organisasi

	Laporan Bulanan	Terbaca	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Perencanaan dan Organisasi
	Laporan Triwulan	Terbaca	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Perencanaan dan Organisasi
	Laporan Semesteran	Terbaca	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Perencanaan dan Organisasi
	Laporan Tahunan Unit Kerja	Terbaca	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Perencanaan dan Organisasi
	Laporan Tahunan Lembaga/Instansi	Terbaca	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Perencanaan dan Organisasi
	Laporan Triakbatal	Terbaca	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Perencanaan dan Organisasi
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah					
	Laporan Akuntabilitas Unit Kerja	Baca/Terbaca	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang menunjang kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Perencanaan dan Organisasi
	Laporan Akuntabilitas Instansi	Baca/Terbaca	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang menunjang kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Perencanaan dan Organisasi
Struktural Kinerja					
	Evaluasi Kinerja Unit Kerja	Terbaca	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Perencanaan dan Organisasi
	Evaluasi Kinerja Kementerian	Terbaca	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Perencanaan dan Organisasi
II. ORGANISASI, SARANA PRASARANA					
	Pemetaan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia	Baca/Terbaca	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang menunjang kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Perencanaan dan Organisasi

	Indikator Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perencanaan	Memiliki dampak yang dapat mengoptimalkan tercapainya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Perencanaan dan Organisasi
	Pengelolaan Ketatidakhadiran	Biasa/Teknis	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perencanaan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Perencanaan dan Organisasi
	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Biasa/Teknis	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perencanaan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Perencanaan dan Organisasi
	Analisa dan Evaluasi Jabatan	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perencanaan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Perencanaan dan Organisasi
III. RUMAH KEMERDEKAAN					
Perencanaan Anggaran					
	Ketetapan pagu indikatif/pagu sementara	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perencanaan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tercapainya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Perencanaan dan Organisasi
	Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perencanaan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tercapainya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Perencanaan dan Organisasi
	Revisi Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA/KL)	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perencanaan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tercapainya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Perencanaan dan Organisasi
	Revisi Anggaran Satuan Kerja Instansi Pemerintah (RANSIP)	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perencanaan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tercapainya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Perencanaan dan Organisasi
Pengawasan Anggaran					
	Ketetapan pagu indikatif/pagu sementara	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perencanaan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tercapainya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Keuangan
	Revisi Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA/KL)	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perencanaan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tercapainya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Keuangan
	Revisi Anggaran	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perencanaan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tercapainya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Keuangan

	Pengurusan Pagar Definitif	Terbatas	Pegawai Administrasi, Penguasa Tinggi Peranan, Penguasa Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Penguasa, Kepala Persekutuan	Mendaki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Persekutuan	Risik Kewangan
	Pengurusan DEFA	Terbatas	Pegawai Administrasi, Penguasa Tinggi Peranan, Penguasa Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Penguasa, Kepala Persekutuan	Mendaki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Persekutuan	Risik Kewangan
	Pengurusan Tugasan PNHSP	Terbatas	Pegawai Administrasi, Penguasa Tinggi Peranan, Penguasa Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Penguasa, Kepala Persekutuan	Mendaki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Persekutuan	Risik Kewangan
	Pengurusan Ketetapan/Pemutusan yang terdapat akibat pelaksanaan, pemutusan/pemutusan dan pertanggung jawaban anggaran	Terbatas	Pegawai Administrasi, Penguasa Tinggi Peranan, Penguasa Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Penguasa, Kepala Persekutuan	Mendaki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Persekutuan	Risik Kewangan
Pelaksanaan Anggaran					
	Pengawasan/Pemantauan Anggaran (Berkas Sistem Pajak (SSP))	Terbatas	Pegawai Administrasi, Penguasa Tinggi Peranan, Penguasa Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Penguasa, Kepala Persekutuan	Mendaki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Persekutuan	Masing-masing Badan Kerja
	Surat Setoran Duitar Pajak (SSDP)	Terbatas	Pegawai Administrasi, Penguasa Tinggi Peranan, Penguasa Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Penguasa, Kepala Persekutuan	Mendaki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Persekutuan	Masing-masing Badan Kerja
	Salin Pemantauan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Terbatas	Pegawai Administrasi, Penguasa Tinggi Peranan, Penguasa Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Penguasa, Kepala Persekutuan	Mendaki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Persekutuan	Masing-masing Badan Kerja
	Dua Salin Hasil yang diserahkan dari Pajak (PSB, RPTB, Pajak Penghasilan)	Terbatas	Pegawai Administrasi, Penguasa Tinggi Peranan, Penguasa Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Penguasa, Kepala Persekutuan	Mendaki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Persekutuan	Masing-masing Badan Kerja
	Pemantauan, dan Anggaran Lebih dan Saldo dan atau pelaksanaan Debit/ Kredit	Terbatas	Pegawai Administrasi, Penguasa Tinggi Peranan, Penguasa Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Penguasa, Kepala Persekutuan	Mendaki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Persekutuan	Masing-masing Badan Kerja
	Surat dan / atau GPO	Terbatas	Pegawai Administrasi, Penguasa Tinggi Peranan, Penguasa Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Penguasa, Kepala Persekutuan	Mendaki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Persekutuan	Masing-masing Badan Kerja
	Hutang Negara/Debitan Luar Negeri	Terbatas	Pegawai Administrasi, Penguasa Tinggi Peranan, Penguasa Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Penguasa, Kepala Persekutuan	Mendaki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Persekutuan	Masing-masing Badan Kerja

	Petunjuk Negara	Tertulis	Pejabat Administrasi, Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perencanaan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan pelanggaran hukum dan tugas Kementerian dan Perencanaan	Masing-masing Satuan Kerja
Belanja/Pengeluaran Anggaran					
Dokumen pelaksanaan anggaran barang/jasa					
	Berang Halus Paket	Bisa/Tertulis	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrasi, Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perencanaan	Tidak memiliki dampak yang mengakibatkan kinerja Kementerian dan Perencanaan	Masing-masing Satuan Kerja
	Berang Invertebrate	Bisa/Tertulis	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrasi, Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perencanaan	Tidak memiliki dampak yang mengakibatkan kinerja Kementerian dan Perencanaan	Masing-masing Satuan Kerja
	Jasa	Bisa/Tertulis	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrasi, Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perencanaan	Tidak memiliki dampak yang mengakibatkan kinerja Kementerian dan Perencanaan	Masing-masing Satuan Kerja
	Dokumen penyediaan pelayanan perjalanan barang dan jasa	Bisa/Tertulis	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrasi, Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perencanaan	Tidak memiliki dampak yang mengakibatkan kinerja Kementerian dan Perencanaan	Masing-masing Satuan Kerja
	Bayar Perintah Kerja/Bayar Pengadaan Barang/Kontrak	Bisa/Tertulis	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrasi, Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perencanaan	Tidak memiliki dampak yang mengakibatkan kinerja Kementerian dan Perencanaan	Masing-masing Satuan Kerja
	Dokumen yang akan menjadi data pendukungnya	Bisa/Tertulis	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrasi, Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perencanaan	Tidak memiliki dampak yang mengakibatkan kinerja Kementerian dan Perencanaan	Masing-masing Satuan Kerja
	Bukti Acara Pengiriman barang, Bukti Acara Berdikar, dan Bukti Acara Pengiriman	Bisa/Tertulis	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrasi, Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perencanaan	Tidak memiliki dampak yang mengakibatkan kinerja Kementerian dan Perencanaan	Tidak memiliki dampak yang mengakibatkan kinerja Kementerian dan Perencanaan
	Pengiriman/transfer, Paket Pajak, Surat Perizinan, dan/atau surat dan produksinya antara lain: copy surat pajak, nota kredit dll	Bisa/Tertulis	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrasi, Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perencanaan	Tidak memiliki dampak yang mengakibatkan kinerja Kementerian dan Perencanaan	Masing-masing Satuan Kerja
	Bukti Pengeluaran Kas/Bank	Tertulis	Pejabat Administrasi, Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perencanaan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan pelanggaran hukum dan tugas Kementerian dan Perencanaan	Masing-masing Satuan Kerja

		Batas Perencanaan Pelaksanaan (BPP)	Batas/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pangrehet, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Mening-mening Satuan Kerja
		Batas perintah Menubeges (BPM)	Batas/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pangrehet, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Mening-mening Satuan Kerja
		Batas Perintah Perencanaan Dana (BPPD) secara langsung	Batas/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pangrehet, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Mening-mening Satuan Kerja
		Pembinaan Angggaran Unit: Baku dan Utusan (BNU)	Tertutup	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pangrehet, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Mening-mening Satuan Kerja
		Baku dan Perencanaan (BKP)	Tertutup	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pangrehet, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Mening-mening Satuan Kerja
		Sekelompok Kerja Baku	Tertutup	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pangrehet, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Mening-mening Satuan Kerja
		Baku Pokok	Tertutup	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pangrehet, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Mening-mening Satuan Kerja
		Baku-baku/baku pembantu berakumulasi	Tertutup	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pangrehet, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Mening-mening Satuan Kerja
		Baku/Baku Gaji	Tertutup	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pangrehet, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Bisa Baugan
		Baku Aspek Perencanaan	Tertutup	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pangrehet, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Mening-mening Satuan Kerja
		Kan/Baku Perencanaan Kan	Tertutup	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pangrehet, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Mening-mening Satuan Kerja

	Programas dan penelitian terkait kesehatan/karier pada Dalam /Organisasi Internasional	Tertulis	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutan, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengabdikan tugasnya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Meeting-meeting Satuan Kerja
	Verifikasi Anggapan Piutang Hasil Verifikasi (RHV) dan Jembatani Nota Hasil Verifikasi (JNV)	Tertulis	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutan, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengabdikan tugasnya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Meeting-meeting Satuan Kerja
	Perencanaan Biaya Pendidikan Anak (BPPN)	Tertulis	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutan, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengabdikan tugasnya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Keuangan
	Bahan Pustaka (Pustaka Resmi (BPPR))	Tertulis	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutan, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengabdikan tugasnya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Keuangan
	Bahan Pustaka Pejakutan Duta (BP-Jedut)	Tertulis	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutan, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengabdikan tugasnya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Keuangan
	Bantuan Luar Negeri Pembayaran Pajakasiun Luar Negeri (BPPN)	Tertulis	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutan, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengabdikan tugasnya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Meeting-meeting Satuan Kerja
	Dukungan Kemitraan negara dalam ambisiasi (Gory Book)	Tertulis	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutan, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengabdikan tugasnya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Meeting-meeting Satuan Kerja
	Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) dan sejenisnya	Tertulis	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutan, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengabdikan tugasnya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Meeting-meeting Satuan Kerja
	Ordinanasi Luar Agreement: draft agreement, legal opinion, surat menyurat, surat, dan	Tertulis	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutan, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengabdikan tugasnya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Meeting-meeting Satuan Kerja
	Aktual dan likuidasi pengurusan dan luar negeri, serta lain urusan lainnya	Tertulis	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutan, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengabdikan tugasnya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Meeting-meeting Satuan Kerja
	Agenda penelitian dan Bantuan Luar Negeri (BLS)	Tertulis	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutan, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengabdikan tugasnya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Meeting-meeting Satuan Kerja

	Ornamen Persewaan Denda (governor advice)	Terbatas	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungsiwal, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Bagian Keuangan
	Kontrol persediaan dana bantuan luar negeri	Terbatas	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungsiwal, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Bagian Keuangan
	Permintaan persediaan dana dari negara donor	Terbatas	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungsiwal, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Bagian Keuangan
	Staff Approval Report	Terbatas	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungsiwal, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Bagian Keuangan
	Laporan Hutang Negara	Terbatas	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungsiwal, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Bagian Keuangan
	Notifikasi/persetujuan yang diserahkan bantuan/pinjaman luar negeri	Terbatas	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungsiwal, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Bagian Keuangan
Pergerakan APBN/Batas Penerimaan/Hutang Luar Negeri (PDB)					
	Keputusan Pengalokasian Anggaran, termasuk peninjauan				
	Skema Pengalokasian Anggaran	Terbatas	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungsiwal, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
	Skema Pengalokasian Harap/Jasa	Terbatas	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungsiwal, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
	Pejabat Pembiayaan Keuangan	Terbatas	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungsiwal, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
	Pejabat Pembiayaan Dana Gaji	Terbatas	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungsiwal, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
	Pejabat Pembiayaan SIPN	Terbatas	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungsiwal, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja

	Realisasi Perencanaan/Pergerakan	Tertutup	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutan, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
	Perfeksi Harang	Tertutup	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutan, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
	Pejabat /Pembina Pengadaan (termasuk biaya acara socio terdapat jabatan)	Tertutup	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutan, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah					
	Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	Buka/Tertutup	Pejabat Pengawasan, Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutan, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
	Bukti Acara Rekonsiliasi	Tertutup	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutan, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
	Daftar Transaksi (DT), Pengalokasian (PA), Perencanaan (PP), Dukungan Sumber (DS), Belanja Jurnal (BJ), Sistem Transaksi Besar (STB) Surat Belanja Bukuan Pajak (SBBP), Giro 5 atau Giro 8, Surat Perintah Pencatatan Dana (SPPD), NPM dalam rangka pelaksanaan pengembalian dan penugasan dari pengalokasian (SPDR)	Tertutup	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutan, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
	Moem Penerimaan (MP)	Tertutup	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutan, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
	Daftar (daftar rekening penanaman) buku catatan dan tindakan lain (DA)	Tertutup	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutan, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
	Laporan realisasi belasan SA (Sistem Akuntansi Internal)	Tertutup	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutan, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
	Laporan realisasi operasi SA dan Unit Akuntansi	Tertutup	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutan, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
	Laporan realisasi Anggaran dan Perencanaan	Tertutup	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutan, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja

	Laporan realisasi Anggaran Negara Tahunan	Terbaca	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
	Laporan Kegiatan K/L Tahunan	Terbaca	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
Pertanggung Jawabannya Kementerian Negara					
	Laporan Ayoari Pemerintah Pengalihan LUP Laporan Hasil Pelaksanaan	Rubrika	Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan urusan, urusan dan nasional dan/atau kebijakan umum	Inspektur Jenderal
	MSP (Memonitoring Hasil Pelaksanaan)	Terbaca	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Inspektur Jenderal
	Tindak Lanjut/Tanggapan LUP	Terbaca	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Inspektur Jenderal
Saluran Penyelidikan Keuangan Negara					
	Tuntutan Subvaksinasi	Terbaca	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
	Tuntutan Ganti Rugi	Terbaca	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
Akreditasi dan Poliposisi Keuangan					
	Laporan Realisasi NIS	Terbaca	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
	Laporan Realisasi Anggaran (LRA), NIS, Kajian, Akreditasi, Catatan atas laporan keuangan termasuk arsip data komputer	Terbaca	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
	Laporan Penilaian NIS	Terbaca	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Sisa Keuangan
	Laporan Realisasi Kredit Anggaran (LRA) Indikasi, Tindakan, Remediasi	Terbaca	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Sisa Keuangan

	Laporan Kegiatan Tahunan/Laporan RMBL	Tertutup	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Persekitiran	Mendapat dampak yang dapat meningkatkan tercapainya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Persekitiran	Mening-mening Satuan Kerja
	Cerahan Atas Laporan Keuangan (CALA)	Tertutup	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Persekitiran	Mendapat dampak yang dapat meningkatkan tercapainya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Persekitiran	Mening-mening Satuan Kerja
	Laporan Perkembangan realisasi pemerintahan, nasional belajar regional, belajar belajar dan belajar belajar	Tertutup	Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Persekitiran	Mendapat dampak yang dapat meningkatkan tercapainya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Persekitiran	Mening-mening Satuan Kerja
	Laporan Realisasi Pelaksanaan Negara dari masing-masing Satuan Kerja	Tertutup	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Persekitiran	Mendapat dampak yang dapat meningkatkan tercapainya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Persekitiran	Mening-mening Satuan Kerja
	Laporan Pelaksanaan Masing Masing Masing Negara	Tertutup	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Persekitiran	Mendapat dampak yang dapat meningkatkan tercapainya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Persekitiran	Mening-mening Satuan Kerja
	Mening-mening dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran	Tertutup	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Persekitiran	Mendapat dampak yang dapat meningkatkan tercapainya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Persekitiran	Bagian Keuangan
IV. KEGIATAN					
	Pengelolaan Keuangan	Buka/Tertutup	Pejabat Keuangan, Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Persekitiran	Tidak memiliki dampak yang signifikan karena Kementerian dan Persekitiran	Biro Sumber Daya Manusia
	Pengelolaan Pegawai	Buka/Tertutup	Pejabat Keuangan, Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Persekitiran	Tidak memiliki dampak yang signifikan karena Kementerian dan Persekitiran	Biro Sumber Daya Manusia
	Pengelolaan Pegawai	Buka/Tertutup	Pejabat Keuangan, Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Persekitiran	Tidak memiliki dampak yang signifikan karena Kementerian dan Persekitiran	Biro Sumber Daya Manusia
	Pelaksanaan Kerja Pegawai	Buka/Tertutup	Pejabat Keuangan, Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Persekitiran	Tidak memiliki dampak yang signifikan karena Kementerian dan Persekitiran	Biro Sumber Daya Manusia
	Pelaksanaan Kerja/Mening	Buka/Tertutup	Pejabat Keuangan, Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Persekitiran	Tidak memiliki dampak yang signifikan karena Kementerian dan Persekitiran	Biro Sumber Daya Manusia

Tugas Belajar	Stase/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutasi, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang signifikan kinerja Kementerian dan Perwakilan	Bisa Sumber Daya Manusia
Pengalokasian Sumber Daya/Pengalokasian/Golongan dan Jabatan Pungutasi	Tertutup	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutasi, Kepala Perwakilan	Mampu dampak yang dapat meningkatkan tanggungjawab pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Bisa Sumber Daya Manusia
Kontrol dan Pengawasan	Tertutup	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutasi, Kepala Perwakilan	Mampu dampak yang dapat meningkatkan tanggungjawab pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Bisa Sumber Daya Manusia
Kontrol dan Pengawasan	Tertutup	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutasi, Kepala Perwakilan	Mampu dampak yang dapat meningkatkan tanggungjawab pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Bisa Sumber Daya Manusia
Ujian Dasar	Stase/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutasi, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang signifikan kinerja Kementerian dan Perwakilan	Bisa Sumber Daya Manusia
Ujian Penyelesaian	Stase/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutasi, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang signifikan kinerja Kementerian dan Perwakilan	Bisa Sumber Daya Manusia
Ujian Kompetensi/Sertifikasi	Stase/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutasi, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang signifikan kinerja Kementerian dan Perwakilan	Bisa Sumber Daya Manusia
Pengalokasian dan Pembentukan Jabatan	Tertutup	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutasi, Kepala Perwakilan	Mampu dampak yang dapat meningkatkan tanggungjawab pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Bisa Sumber Daya Manusia
Pembentukan Jabatan	Tertutup	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutasi, Kepala Perwakilan	Mampu dampak yang dapat meningkatkan tanggungjawab pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Bisa Sumber Daya Manusia
Mutasi Pegawai	Tertutup	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutasi, Kepala Perwakilan	Mampu dampak yang dapat meningkatkan tanggungjawab pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Bisa Sumber Daya Manusia
Pembinaan Jabatan Pungutasi				

Jabatan Fungsional Diplomat	Batas/Terbuka	Pejabat Penguasa, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang merugikan kinerja Kementerian dan Perwakilan	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional
Jabatan Fungsional Penata Teknis/Diplomasi	Batas/Terbuka	Pejabat Penguasa, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang merugikan kinerja Kementerian dan Perwakilan	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional
Jabatan Fungsional Penata Kelembagaan	Batas/Terbuka	Pejabat Penguasa, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang merugikan kinerja Kementerian dan Perwakilan	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional
Jabatan Fungsional Auditor	Batas/Terbuka	Pejabat Penguasa, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang merugikan kinerja Kementerian dan Perwakilan	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional
Jabatan Fungsional Aspek	Batas/Terbuka	Pejabat Penguasa, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang merugikan kinerja Kementerian dan Perwakilan	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional
Jabatan Fungsional Aspek Kepegawaian	Batas/Terbuka	Pejabat Penguasa, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang merugikan kinerja Kementerian dan Perwakilan	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional
Jabatan Fungsional Perencanaan	Batas/Terbuka	Pejabat Penguasa, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang merugikan kinerja Kementerian dan Perwakilan	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional
Jabatan Fungsional Penunjang Organisasi Perencanaan-kepegawaian	Batas/Terbuka	Pejabat Penguasa, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang merugikan kinerja Kementerian dan Perwakilan	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional
Jabatan Fungsional Penunjang	Batas/Terbuka	Pejabat Penguasa, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang merugikan kinerja Kementerian dan Perwakilan	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional
Jabatan Fungsional Penunjang Kepegawaian	Batas/Terbuka	Pejabat Penguasa, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang merugikan kinerja Kementerian dan Perwakilan	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional

	Jabatan Fungsional Lainnya	Bebas/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutan, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang signifikan secara kuantitatif dan Persepsi	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional
	Pembinaan Penguji Pengawasan dan Tindak Jarak Pegawai	Bebas/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutan, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang signifikan secara kuantitatif dan Persepsi	Biro Sumber Daya Manusia
	Segitiga Kepengawasan	Tertutup	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutan, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Sumber Daya Manusia
	Mahaman Singkat	Tertutup	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutan, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Sumber Daya Manusia
	Administrasi Pegawai Mutasi Keluar	Tertutup	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutan, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Sumber Daya Manusia
	Kendala Gaji Bersih (KGB)	Tertutup	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutan, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Sumber Daya Manusia
	Data/Informasi Pegawai /Pegawai	Tertutup	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutan, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Sumber Daya Manusia
	Kartu Pegawai	Tertutup	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutan, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Sumber Daya Manusia
	Kartu Index (KARS)/Kartu Status (KARSU)	Tertutup	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutan, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Sumber Daya Manusia
	Kartu Tagasi	Tertutup	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutan, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Sumber Daya Manusia
	Kartu Jaminan Kesehatan	Tertutup	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutan, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Sumber Daya Manusia

	Laporan Hasil Kegiatan Pejabat Negara (LHKPN)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madia, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Persekutuan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Persekutuan	Biro Sumber Daya Manusia
	Cetak Penguji	Terbuka	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madia, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Persekutuan	Mendaki dampak yang dapat mengakibatkan pelanggaran hukum dan tugas Kementerian dan Persekutuan	Biro Sumber Daya Manusia
	Keasahutan Pegawai Turjangan Jilbab dan Kemeja	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madia, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Persekutuan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Persekutuan	Biro Sumber Daya Manusia
	Satuan Rupa Pendidikan Anak Jember di Luar Negeri	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madia, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Persekutuan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Persekutuan	Biro Sumber Daya Manusia
	Perumahan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madia, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Persekutuan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Persekutuan	Biro Umum
	Pendidikan Persepsi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madia, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Persekutuan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Persekutuan	Biro Sumber Daya Manusia
	Programas Jember	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madia, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Persekutuan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Persekutuan	Biro Sumber Daya Manusia
	Keasahutan Pegawai Dinas Hutan	Tertutup	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madia, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Persekutuan	Mendaki dampak yang dapat mengakibatkan pelanggaran hukum dan tugas Kementerian dan Persekutuan	Biro Sumber Daya Manusia
	Tidak Dinas Hutan	Tertutup	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madia, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Persekutuan	Mendaki dampak yang dapat mengakibatkan pelanggaran hukum dan tugas Kementerian dan Persekutuan	Biro Sumber Daya Manusia
	Pengelolaan Organisasi dan Keasahutan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madia, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Persekutuan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Persekutuan	Biro Sumber Daya Manusia

	Direksi Wanita	Batas/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perencanaan	Tidak memiliki dampak yang merugikan kinerja Kementerian dan Perencanaan	Rita Suciati Daya Marzuki
	Regional	Batas/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perencanaan	Tidak memiliki dampak yang merugikan kinerja Kementerian dan Perencanaan	Rita Suciati Daya Marzuki
	Yayasan Yayasan	Batas/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perencanaan	Tidak memiliki dampak yang merugikan kinerja Kementerian dan Perencanaan	Rita Suciati Daya Marzuki
	Organisasi Non Pemerintah lainnya	Batas/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perencanaan	Tidak memiliki dampak yang merugikan kinerja Kementerian dan Perencanaan	Rita Suciati Daya Marzuki
Berikut Terdiri Jabatan Pimpinan Tinggi					
	Tingkat Madya	Tertutup	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perencanaan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan kerugian pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perencanaan	Rita Suciati Daya Marzuki
	Tingkat Pratama	Tertutup	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perencanaan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan kerugian pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perencanaan	Rita Suciati Daya Marzuki
	Pengelola Personal File	Tertutup	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perencanaan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan kerugian pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perencanaan	Rita Suciati Daya Marzuki
V. PERLENGKAPAN					
	Pengelola Barang dan Jasa	Batas/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perencanaan	Tidak memiliki dampak yang merugikan kinerja Kementerian dan Perencanaan	Masing-masing Satuan Kerja
	Perangkat Keras	Batas/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perencanaan	Tidak memiliki dampak yang merugikan kinerja Kementerian dan Perencanaan	Masing-masing Satuan Kerja
	Kendaraan Dinas	Batas/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perencanaan	Tidak memiliki dampak yang merugikan kinerja Kementerian dan Perencanaan	Masing-masing Satuan Kerja

	Instansi/Unit Kerja	Bidang/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Persekolahan	Tidak memiliki dampak yang signifikan secara administratif dan Persekolahan	Biro Umum
	Tanah	Terbuka	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Persekolahan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tugas administratif dan Persekolahan	Biro Umum
	Bangunan	Terbuka	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Persekolahan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tugas administratif dan Persekolahan	Biro Umum
	Peralatan Meubel dan Listrik	Bidang/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Persekolahan	Tidak memiliki dampak yang signifikan secara administratif dan Persekolahan	Biro Umum
	Aset Tak Berwujud (ATB)	Terbuka	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Persekolahan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tugas administratif dan Persekolahan	Biro Umum
Penggunaan Fasilitas Kantor					
	Perengkapan Kantor	Bidang/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Persekolahan	Tidak memiliki dampak yang signifikan secara administratif dan Persekolahan	Masing-masing Satuan Kerja
	Kendaraan Dinas	Bidang/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Persekolahan	Tidak memiliki dampak yang signifikan secara administratif dan Persekolahan	Masing-masing Satuan Kerja
	Daftar	Bidang/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Persekolahan	Tidak memiliki dampak yang signifikan secara administratif dan Persekolahan	Biro Umum
	Sarana Telekomunikasi	Bidang/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Persekolahan	Tidak memiliki dampak yang signifikan secara administratif dan Persekolahan	Biro Umum
	Tanah dan Bangunan	Terbuka	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Persekolahan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tugas administratif dan Persekolahan	Biro Umum
	Pengelolaan Dokumentasi dan Penataan Aset Tanah dan Bangunan	Terbuka	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Persekolahan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tugas administratif dan Persekolahan	Biro Umum

Pengelolaan Keuangan dan Ketertiban di Lingkungan Kementerian					
Personel	Tertutup	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktur Umum	
Lingkungan Kerja	Tertutup	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktur Umum	
Pengelolaan Bureau MDR Negeri					
Penerapan Sistem Pengawasan (SPS) Bureau MDR Negeri	Tertutup	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktur Umum	
Pengelolaan Data Bureau MDR Negeri	Tertutup	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktur Umum	
Pengawasan Ulahat Bureau MDR Negeri	Tertutup	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktur Umum	
Pengawasan Bureau MDR Negeri	Batas/Tertutup	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Direktur Umum	
Pelaporan Bureau MDR Negeri	Tertutup	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktur Umum	
Bidang/Bagian Teknis Pengelolaan Bureau MDR Negeri	Batas/Tertutup	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Direktur Umum	
Penelitian dan Pengembangan					
Gejala dan Gejala Sosial	Batas/Tertutup	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Direktur Umum	
Peraturan Menteri	Batas/Tertutup	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Sesuai Kerja	

	Kendaraan Dinas	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutan, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang signifikan kinerja Kementerian dan Perwakilan	Manajemen Sistem Kerja
	Pendataan Monev dan Litbang	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutan, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang signifikan kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Umum
	Usulan Guben Perencanaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutan, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang signifikan kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Umum
Layanan Pengabdian					
	Layanan Bidang Kontrol	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutan, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang signifikan kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Umum
	Layanan Bidang Bina dan Bina Kontrol	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutan, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang signifikan kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Umum
	Layanan Bidang Bina dan Bina Monev	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutan, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang signifikan kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Umum
	Kompetensi Standar Daya Manusia di Bidang Pengabdian dan Penelitian	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutan, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang signifikan kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Umum
VI. KETUPAKSI					
Bidang Kerja Antar Lembaga					
	Bidang Kerja Politik, Hukum dan Keamanan	Tertutup	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutan, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat meningkatkan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Dukungan Strategis
	Bidang Kerja Perencanaan	Tertutup	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutan, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat meningkatkan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Dukungan Strategis
	Bidang Kerja Sosial dan Budaya	Tertutup	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pungutan, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat meningkatkan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Dukungan Strategis

	Pendidikan Khusus di Luar Negeri	Tertulis	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat meningkatkan tanggungjawab pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Urusan
	Pengalokasian Dukungan Substansi Program Dalam Regeri				
	Program Kerja Arah dan Program Pelaksana	Tertulis	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat meningkatkan tanggungjawab pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Dukungan Strategis Pimpinan
	Pengalokasian Keperawatan Non Pemerintah	Tertulis	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat meningkatkan tanggungjawab pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Dukungan Strategis Pimpinan
	Program Kerja Kementerian dan Lembaga	Tertulis	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat meningkatkan tanggungjawab pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Dukungan Strategis Pimpinan
	Isu-isu Khusus Dalam Negeri	Tertulis	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat meningkatkan tanggungjawab pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Dukungan Strategis Pimpinan
	Pengalokasian Dukungan Substansi Program Luar Negeri				
	Program dengan Mitra Kerja	Tertulis	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat meningkatkan tanggungjawab pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Dukungan Strategis Pimpinan
	Program dengan Organisasi Internasional	Tertulis	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat meningkatkan tanggungjawab pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Dukungan Strategis Pimpinan
	Program dengan Organisasi Regional	Tertulis	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat meningkatkan tanggungjawab pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Dukungan Strategis Pimpinan
	Isu-isu Khusus Luar Negeri	Tertulis	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat meningkatkan tanggungjawab pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Dukungan Strategis Pimpinan
	Hubungan Media dan Juru Bicara				
	Hubungan Media Massa dengan Juru Bicara	Tertulis	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat meningkatkan tanggungjawab pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Dukungan Strategis Pimpinan
	Hubungan Strategi Komunikasi Diplomat Digital	Tertulis	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat meningkatkan tanggungjawab pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Dukungan Strategis Pimpinan

	Didukung Substantif Kebijakan	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direksi Dukungan Strategis Pimpinan
Keperluan					
	Pengembangan Sekretariat dan Korespondensi Pimpinan	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Dukungan Strategis Pimpinan
	Pengembangan Kegiatan Menteri dan Wakil Menteri	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direksi Dukungan Strategis Pimpinan
	Berperan Pendukung/Monitoring DPR	Bahasa	Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi pemerintahan negara, paktor dan nasional dan/atau kebijakan umum	Biro Dukungan Strategis Pimpinan
	Dokumentasi dan Penyebaran	Bahasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengakibatkan kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Dukungan Strategis Pimpinan
	Penyusunan/Keputusan/Laporan, Festival, Pembentukan Spanduk, dan Baku	Bahasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengakibatkan kinerja Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing Satuan Kerja
	Pengembangan/Isuasi Lembar Kertas	Bahasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengakibatkan kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Dukungan Strategis Pimpinan
	Pembinaan Urusan	Bahasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengakibatkan kinerja Kementerian dan Perwakilan	Biro Dukungan Strategis Pimpinan
IV. LAIN-LAIN					
	Pengembangan Pembinaan Perundang-undangan	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan
	Pembinaan Pertimbangan Hukum	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan
	Pengawasan Produk Hukum	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan

	Pelaksanaan Administrasi Hakam	Tertulis	Pejabat Administrasi, Pejabat Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktoran dan Asisten/Manajer dan Perwakilan
	Standarisasi Proses Hakam	Bisnis/Tertulis	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengakibatkan kinerja Kementerian dan Perwakilan	Direktoran dan Asisten/Manajer dan Perwakilan
VIII. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan					
Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan					
	Pengembangan Kompetensi Tenaga Pengajar	Bisnis/Tertulis	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengakibatkan kinerja Kementerian dan Perwakilan	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
	Alokasi Pendidikan dan Pelatihan	Tertulis	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan					
	Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik	Bisnis/Tertulis	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengakibatkan kinerja Kementerian dan Perwakilan	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
	Pendidikan dan Pelatihan Teoris	Bisnis/Tertulis	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengakibatkan kinerja Kementerian dan Perwakilan	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
	Pendidikan dan Pelatihan Non Diplomatik	Bisnis/Tertulis	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengakibatkan kinerja Kementerian dan Perwakilan	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
	Pelaksanaan Kerja Sama Lembaga Tidak	Bisnis/Tertulis	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengakibatkan kinerja Kementerian dan Perwakilan	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
	Monitoring dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan	Bisnis/Tertulis	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengakibatkan kinerja Kementerian dan Perwakilan	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
IX. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI					
	Penggunaan Rencana Teknologi Informasi dan Komunikasi (RTK)	Tertulis	Pejabat Administrasi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	PUSITIK RP

Pengembangan Strategi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Tertulis	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pangrehwal, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat meningkatkan tercapainya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	PUSLIK KP
Pembinaan Keputusahan terhadap Kebijakan SPBE	Tertulis	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pangrehwal, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat meningkatkan tercapainya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	PUSLIK KP
Pengelolaan Manajemen Pengaturan SPBE	Tertulis	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pangrehwal, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat meningkatkan tercapainya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	PUSLIK KP
Pengelolaan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan SPBE	Tertulis	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pangrehwal, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat meningkatkan tercapainya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	PUSLIK KP
Layanan Pembarukan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIR)	Tertulis	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pangrehwal, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat meningkatkan tercapainya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	PUSLIK KP
Manajemen, Evaluasi dan Pelaporan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIR)	Tertulis	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pangrehwal, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat meningkatkan tercapainya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	PUSLIK KP
3. KEMENDIK				
Pengelolaan dan Pengaturan Bina	Ruang/Tertulis	Pejabat Pangrehwal, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pangrehwal, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang signifikan secara Kementerian dan Perwakilan	Bisa Hukam dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan
Pengaturan dan Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan	Ruang/Tertulis	Pejabat Pangrehwal, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pangrehwal, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang signifikan secara Kementerian dan Perwakilan	Bisa Hukam dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan
Pengaturan Instrumen Kebijakan	Ruang/Tertulis	Pejabat Pangrehwal, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pangrehwal, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang signifikan secara Kementerian dan Perwakilan	Bisa Hukam dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan
4. PUSLIK				
Pembinaan Aspek	Ruang/Tertulis	Pejabat Pangrehwal, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pangrehwal, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang signifikan secara Kementerian dan Perwakilan	Bisa Hukam dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan
Proses dan Aspek	Ruang/Tertulis	Pejabat Pangrehwal, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Pangrehwal, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang signifikan secara Kementerian dan Perwakilan	Bisa Hukam dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan

	Pengembangan Aritip Stratis	Biasa/Tertulis	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Bisa Hukam dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan
	Layanan Pembelajaran Aritip	Tertulis	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat meningkatkan tercapainya pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Bisa Hukam dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan
	Pembinaan Keagamaan Pembinaan Sastra dan Daya Manusia Keagamaan	Biasa/Tertulis	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Bisa Hukam dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan
	Musyawarah dan Endorse Keagamaan	Biasa/Tertulis	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Bisa Hukam dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan
Pengawasan Keagamaan					
XII. PERHIMPATAN					
	Pengaduan Badan Partisipasi	Biasa/Tertulis	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri
	Pengaduan Badan Partisipasi	Biasa/Tertulis	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri
	Pemeriksaan Badan Partisipasi	Biasa/Tertulis	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri
	Kerja Sama Perpartisipasi	Biasa/Tertulis	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri
	Layanan Perpartisipasi	Biasa/Tertulis	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri
XIII. PERHIMPATAN					
	Rencana Program Pengawasan Rencana Strategi Pengawasan	Bahasa	Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat meningkatkan tercapainya fungsi penyelenggaraan urusan, sesuai daya nasional dan/atau kontribusi umum	Inspekturat Jenderal

	Enkabel Indonesia dan Bankasi (EIB)	Tertulis	Pejabat Administrasi, Penguasa Tinggi Pertama, Penguasa Tinggi Kedua, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Penguasa, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Inspektur Jenderal
	Enkabel Program Lainnya	Tertulis	Pejabat Administrasi, Penguasa Tinggi Pertama, Penguasa Tinggi Kedua, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Penguasa, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Inspektur Jenderal
	Pemantauan/Monitoring Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan/Program	Tertulis	Pejabat Administrasi, Penguasa Tinggi Pertama, Penguasa Tinggi Kedua, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Penguasa, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Inspektur Jenderal
	Pemantauan Lainnya	Tertulis	Pejabat Administrasi, Penguasa Tinggi Pertama, Penguasa Tinggi Kedua, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Penguasa, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Inspektur Jenderal
	Pengadaan Masyarakat	Kebijakan	Penguasa Tinggi Pertama, Penguasa Tinggi Kedua, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Penguasa, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi pemerintahan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertahanan nasional	Inspektur Jenderal
	Laporan Hasil Pengawasan Aktivitas Hasil Pengawasan (HPP) berupa Laporan Hasil Pengawasan Aspek Pengawasan Internal Pemerintah (APPI) baik yang disampaikan ke Kementerian Pengawasan Aspek Negara dan Reformasi Birokrasi, BPK maupun HPPD serta tanggapan atas Laporan Hasil Pengawasan BPK terhadap Tindak Lanjut atas Laporan	Tertulis	Pejabat Administrasi, Penguasa Tinggi Pertama, Penguasa Tinggi Kedua, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Penguasa, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Inspektur Jenderal
	Penelitian Pelaksanaan dan Tindakan Hasil Ragi (PP-TOB) seperti : a. Laporan Kebijakan, b. Berita Acara Kebijakan Ragi/Uang c. Surat Keputusan Tanggung Jawab Hasil (Surat Keputusan untuk pengawasan ke Kas Negara, Surat Keputusan Pengawasan yang dan barang resmi dengan Laporan Pengawasan Tindakan Pelaksanaan, Tindakan Ganti Rugi	Kebijakan	Penguasa Tinggi Pertama, Penguasa Tinggi Kedua, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Penguasa, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi pemerintahan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertahanan nasional	Inspektur Jenderal
	Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tidak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan BPK	Kebijakan	Penguasa Tinggi Pertama, Penguasa Tinggi Kedua, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Penguasa, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi pemerintahan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertahanan nasional	Inspektur Jenderal
	Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan BPK	Kebijakan	Penguasa Tinggi Pertama, Penguasa Tinggi Kedua, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Penguasa, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi pemerintahan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertahanan nasional	Inspektur Jenderal
	Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Inspektur Jenderal	Kebijakan	Penguasa Tinggi Pertama, Penguasa Tinggi Kedua, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Penguasa, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi pemerintahan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertahanan nasional	Inspektur Jenderal
	Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi Pengawasan Ombudsman	Tertulis	Pejabat Administrasi, Penguasa Tinggi Pertama, Penguasa Tinggi Kedua, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Penguasa, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Inspektur Jenderal
	Sistem Integrasi, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Tertulis	Pejabat Administrasi, Penguasa Tinggi Pertama, Penguasa Tinggi Kedua, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Penguasa, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Inspektur Jenderal
	Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPI)				

	Laporan Berita Kelayaan Penyelenggara Negara (BJKPN)	Bebas/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Inspektur Jenderal
	Laporan Berita Kelayaan Aparatur Sipil Negara (BJKASN)	Tertutup	Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Inspektur Jenderal
Kegiatan Pengawasan Lainnya					
	Konsultasi dan Asistensi	Bebas/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Inspektur Jenderal
	Sosialisasi	Bebas/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Inspektur Jenderal
	Rapat Kerja Pengawasan (Bakerwas)/Rapat Koordinasi Pengawas (Bakerwa)	Tertutup	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Inspektur Jenderal
	Koordinasi dengan Aparat Penghak Hakam	Tertutup	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Inspektur Jenderal
	Sistem Informasi/Aplikasi Pengawasan	Tertutup	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Inspektur Jenderal
	Kapabilitas APP (Internal Audit Capability Model - IACM)	Tertutup	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Inspektur Jenderal

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,


RETNO L.P. MARSUDI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN KLASIFIKASI AKSES ARSIP DINAMIS
KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN KLASIFIKASI AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF
KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

NO. URUT	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	AKSES PENGGUNA INTERNAL	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2				
1.	HUBUNGAN BILATERAL DAN INTRAKAWASAN DAN ANTAR KAWASAN				
1	Perumusan Kebijakan dan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri				
	- Usulan rumusan kebijakan;	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing satuan kerja / Perwakilan
	- Penyajian Kebijakan;	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing satuan kerja / Perwakilan
	- Perumusan dan Penyusunan Bahan;	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing satuan kerja / Perwakilan
	- Pemberian Masukan dan Dukungan dalam Penyusunan;	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing satuan kerja / Perwakilan
	- Penetapan dalam bentuk Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria.	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing satuan kerja / Perwakilan
2	Perundingan Kerja Sama Bilateral di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika				

	a	Penyiapan bahan	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing satuan kerja / Perwakilan
	b	Pencakupan dan Penetapan Delegasi RI (Dele)	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing satuan kerja / Perwakilan
	c	Laporan pra perundingan Internasional dan hasil rapat koordinasi	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing satuan kerja / Perwakilan
	d	Perjanjian Kerja Sama dan Laporan Hasil Perundingan meliputi : <i>Memorandum of Understanding (MoU), Letter of intent (LoI), Joint Communiqué, Minutes of Meeting, Agreed Minutes, Record of Discussion, Joint Statement, Joint Declaration dan Agreement agents lainnya</i>	Bebas/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing satuan kerja / Perwakilan
	e	Pemantauan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing satuan kerja / Perwakilan
3	Perundingan Kerja Sama Intra Kawasan dan Antar Kawasan Asia Pasifik dan Afrika					
	a	Asia Pasifik Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security, Asian Parliamentary Assembly (APA), Asian Pacific Parliamentary Forum (APPF), Asia-Pacific Parliamentary Forum on Environment and Development (APPCED), IORA, Asia Middle East Dialogue (AMED), Gulf Cooperation Council (GCC), Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA), Asia Cooperation Dialogue (ACD), Heart of Borneo (HoB), Shanghai Cooperation Organization (SCO), Soan Forum for Asia, South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), Central Asia Cooperation Organization (CACO), Economic Cooperation Organization (ECO), Initiative for Development in East Asia (IDEA), Australia-Indonesia Development Assistance (AIDA), Joint Policy Committee Indonesia-Northern Territory dan Forum kerja sama lainnya di kawasan Asia Pasifik.	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Ditjen Asia Pasifik dan Afrika / Perwakilan
	b	Afrika				

		New Asian-African Strategic Partnership (NAASP), Uni AS-Bia, Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA), Economic Community of West African States (ECOWAS), Southern African Development Community (SADC), East Africa Community (EAC), Southern African Customs Union (SACU), Economic Community of Central African States (ECCAS), Central African Economic and Monetary Community (CEMAC), West African Economic and Monetary Union, Intergovernmental Authority on Development, Liga Arab, Asia Middle East Dialogue (AMED), Gulf Cooperation Council (GCC), Arab Maghreb Union, dan Forum kerja sama lainnya di kawasan Afrika.	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Ditjen Asia Pasifik dan Afrika / Perwakilan
4 Perundingan Kerja Sama Bilateral di Kawasan Amerika dan Eropa						
	a	Penyusunan bahan	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Ditjen Amerika dan Eropa / Perwakilan
	b	Pencabutan dan Penetapan Delegasi RI (Delir)	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Ditjen Amerika dan Eropa / Perwakilan
	c	Laporan pra perundingan internasional dan hasil rapat koordinasi	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Ditjen Amerika dan Eropa / Perwakilan
	d	Perjanjian Kerja Sama dan Laporan Hasil Perundingan meliputi : Memorandum of Understanding (MoU), Letter of Intent (LoI), Joint Communiqué, Minutes of Meeting, Agreed Minutes, Record of Discussion, Wrap-up Discussion, Joint Statement, Joint Declaration dan Agreement sebagai berikut	Biasa/Terbatas	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Ditjen Amerika dan Eropa / Perwakilan
	e	Pemantauan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Ditjen Amerika dan Eropa / Perwakilan
5 Perundingan Kerja Sama Intra Kawasan dan Antar Kawasan Amerika dan Eropa						
	a	Amerika Energy Charter, PEALAC, Pacific Alliance, ALBA, UNASUR, MERCOSUR, OAS, CARICOM, SICA, ALADI, PARLACEN, CELAC, NAFTA, MEXTA, Community of Democracies, OECD, Arctic Council, Antarctic Treaty System, NATO, GUAM, dan Organisasi kerja sama lainnya di kawasan Amerika	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Ditjen Amerika dan Eropa / Perwakilan
	b	Eropa				

		Uni Eropa, ASEAN, Energy Charter, CERN, Energy Community, Eureka, European Science and Technology, COST, EFPA, Community of Democracies, OECD, Council of Europe, AER, NORDIC Council, Council of Baltic States, OSCE, Commonwealth of Nations, CPTP, OIP, Arctic Council, Antarctic Treaty System, CSTO, OSCE, ATRN, Eurasian Economic Union, Union for the Mediterranean dan Organisasi Kerja sama lainnya di kawasan Eropa.	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Dijenj. Amerika dan Eropa / Perwakilan
6	Laporan Penyelenggaraan Promosi Terpadu, Misi Blanka, Misi Budaya dan Kegiatan Sejenis Lainnya		Bebas/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing satuan kerja / Perwakilan
7	Isu dan Laporan Khusus		Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing satuan kerja / Perwakilan
8	Pemberian Penduan Substantif dan	a. Kertas Kerja	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing satuan kerja / Perwakilan
		b. Laporan Diseminasi Hasil Perundingan	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing satuan kerja / Perwakilan
9	Laporan Monitoring dan Evaluasi		Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing satuan kerja / Perwakilan
II. KERJA SAMA ASEAN						
1 Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN						
		a Kerja Sama Politik dan Keamanan				
		1 Kawasan Netral, Bebas dan Damai (Zone of Peace, Freedom and Neutrality/ ZOPFAN); Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (South East Asia Nuclear Weapon Free Zone/ SEAN WGF); Kerja Sama Persahabatan/ Treaty of Amity Cooperation (TAC)	Bebas/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN/ Perwakilan

		2	Perencanaan Direktorat Jenderal ASEAN (ASEAN Director General/ ASEAN DGA), Committee of Permanent Representatives (CPR)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN/ Perwakilan
		3	Analisis Politik dan Koordinasi Senior Officials Meeting (SOM); ASEAN Standing Committee (ASC); Post Ministerial Conference (PMC); ASEAN Ministerial Meetings (AMM); Joint Consultative Meeting (JCM) dan KTT ASEAN (Kerapatan ASEAN)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN/ Perwakilan
		4	Laut China Selatan	Sangat Rahasia	Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau keselamatan bangsa	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN/ Perwakilan
		5	Peninjauan Data Besar Asing untuk ASEAN	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN/ Perwakilan
		6	Keanggotaan Timor Leste di ASEAN	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN/ Perwakilan
		7	ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN/ Perwakilan
		8	Women, Peace and Security	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN/ Perwakilan
		9	ASEAN Outlook on the Indo Pacific	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN/ Perwakilan

		10	Development in Myanmar	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN / Perwakilan
		11	ASEAN Defence Ministerial				
			a) Pemberantasan Terorisme	Biasa/Terbuka	Pejabat Pegawai, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN / Perwakilan
			b) Keamanan Siber	Biasa/Terbuka	Pejabat Pegawai, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN / Perwakilan
			c) Keamanan Maritim	Biasa/Terbuka	Pejabat Pegawai, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN / Perwakilan
			d) Peacekeeping Operation	Biasa/Terbuka	Pejabat Pegawai, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN / Perwakilan
			e) Media Militer	Biasa/Terbuka	Pejabat Pegawai, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN / Perwakilan
			f) Penanggulangan Bencana Darat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pegawai, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN / Perwakilan
		12	ASEAN Ministers Meeting on				
			a) Pemberantasan Terorisme	Biasa/Terbuka	Pejabat Pegawai, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN / Perwakilan

			b	Kejahatan Siber	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik, Keamanan ASEAN / Perwakilan
			c	Kejahatan Ekonomi Internasional	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik, Keamanan ASEAN / Perwakilan
			d	Pencucian Uang	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik, Keamanan ASEAN / Perwakilan
			e	Penyelundupan Narkoba	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik, Keamanan ASEAN / Perwakilan
			f	Penyelundupan Senjata	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik, Keamanan ASEAN / Perwakilan
			g	Penyelundupan Perdagangan/ Hasil Kayu dan Batu	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik, Keamanan ASEAN / Perwakilan
			h	Pembebasan Penyelundupan Manusia	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik, Keamanan ASEAN / Perwakilan
			i	Pembebasan Penyelundupan Manusia	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik, Keamanan ASEAN / Perwakilan

			3	Pemberantasan Bajak Laut	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN / Perwakilan
			13	ASEAN Ministerial Meeting on Drugs Matters (AMMD)/ ASEAN Senior Official on Drug Matters (ASOD)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN / Perwakilan
			14	ASEAN Maritime Forum (AMF), Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN / Perwakilan
			15	ASEAN Regional Mine Action Center (ARMAC)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN / Perwakilan
			16	ASEAN Coast Guard Forum (ACF)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN / Perwakilan
			b	Kerja Sama Hukum dan Hak Asasi				
			1	ASEAN Senior Law Official Meeting/ASLOM, ASEAN Law Ministerial Meeting	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN / Perwakilan
			2	Mutual Legal Assistance	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN / Perwakilan
			3	Studi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN / Perwakilan

		4	Privilege and Immunity	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN / Perwakilan
		5	ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN / Perwakilan
		6	ASEAN Common Visa, Imigrasi dan Konsuler	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN / Perwakilan
		c	Kerja Sama Forum, Lembaga Regional				
		1	ASEAN Regional Forum (ARF)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN / Perwakilan
		2	ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN / Perwakilan
		3	ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN / Perwakilan
		4	ARF Security Policy Conference (ASPC)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN / Perwakilan
		5	Forum, Lembaga Regional dan Entitas ASEAN lainnya	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN / Perwakilan
		2	Kerja Sama Ekonomi ASEAN				
		a	Investasi, Perindustrian, Perdagangan				

1	ASEAN Economic Minister AEMG, Senior Economic Official Meeting (SEOM)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN / Perwakilan
2	Initiative for ASEAN Integration (IAI), ASEAN Single Window (ASW)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN / Perwakilan
3	Perindustrian	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN / Perwakilan
4	Investasi, Perdagangan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN / Perwakilan
5	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN / Perwakilan
6	ASEAN Free Trade Area (AFTA)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN / Perwakilan
7	Pendalaman Bebas ASEAN dengan mitra, Free Trade Agreements/ Economic Partnership, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN / Perwakilan
8	Penyelesaian Sengketa	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN / Perwakilan

		9	Perdagangan Jasa	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN / Perwakilan
		10	Konektivitas	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN / Perwakilan
		11	Keuangan dan Perbankan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN / Perwakilan
		12	Kerja Sama Telekomunikasi dan Digital	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN / Perwakilan
		13	Perhubungan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN / Perwakilan
		14	Konektivitas ASEAN	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN / Perwakilan
		15	Pariwisata	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN / Perwakilan
		16	Desa Cukai	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN / Perwakilan

		17	Pembangunan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN / Perwakilan
		h. Komoditi dan Sumber Daya Alam					
		1	Pertanian	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN / Perwakilan
		2	Kehutanan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN / Perwakilan
		3	Perkebunan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN / Perwakilan
		4	Energi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN / Perwakilan
		5	Perikanan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN / Perwakilan
		6	Pemanfaatan Mineral dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN / Perwakilan
		i. Kerja Sama Subkawasan					
		1	Subkawasan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN / Perwakilan

		2	Subkawasan Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines-East ASEAN Growth Triangle (BIMP-EAGT)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN / Perwakilan
		3	Subkawasan ASTAN lainnya	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN / Perwakilan
		3 Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN					
		a. Kerja Sama Bidang Sosial					
		1	Perempuan dan Anak	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN / Perwakilan
		2	Pemuda	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN / Perwakilan
		3	Olahraga	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN / Perwakilan
		4	Yayasan ASEAN/ASEAN Foundation	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN / Perwakilan
		5	Aparatur Sipil Negara	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN / Perwakilan
		6	Sosial	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN / Perwakilan

		7	Pembangunan Pedesaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN / Perwakilan
		8	Pengentasan Kemiskinan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN / Perwakilan
		9	Kependudukan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN / Perwakilan
		10	Kesehatan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN / Perwakilan
		11	Pelayanan Masyarakat dan Tenaga Kerja Migran	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN / Perwakilan
		b. Kerja Sama Bidang Kebudayaan dan					
		1	Pemerangan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN / Perwakilan
		2	Kebudayaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN / Perwakilan
		3	Pendidikan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN / Perwakilan

		4	Pusat Studi ASEAN (PSA)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN / Perwakilan
		5	Unit Pengetahuan dan Teknologi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN / Perwakilan
		6	Lingkungan Hidup	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN / Perwakilan
		7	Penanggulangan Bencana dan Bantuan Kemanusiaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN / Perwakilan
		4 Kerja Sama Eksternal ASEAN					
		a Kerja Sama Eksternal dengan Asia					
		1	ASEAN - RRT	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan
		2	ASEAN - Jepang	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan
		3	ASEAN - Republik Korea (ROK)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan
		4	ASEAN - Republik Demokratik Rakyat Korea (RDOK)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan

		5	Negara lainnya di Kawasan Asia Timur	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan
		b. Asia Selatan, Afrika dan Pasifik					
		1	ASEAN-Australia	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan
		2	ASEAN-India	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan
		3	ASEAN-Selandia Baru	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan
		4	ASEAN-Pakistan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan
		5	ASEAN-Bangladesh	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan
		6	ASEAN-Fiji	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan
		7	ASEAN-Maroko	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan

		8	ASEAN - Mear	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan
		9	ASEAN - Sri Lanka	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan
		10	Negara lainnya di kawasan Asia Selatan, Afrika dan Pasifik	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan
		c. Amerika, Eropa dan Kawasan Lainnya					
		1	ASEAN - Amerika Serikat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan
		2	ASEAN - Kanada	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan
		3	ASEAN - Uni Eropa	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan
		4	ASEAN - Rusia	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan
		5	ASEAN - Norwegia	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan

		6	ASEAN - Beras	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan
		7	ASEAN - Jerman	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan
		8	ASEAN - Turki	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan
		9	Negara lainnya di Kawasan Amerika dan Eropa	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan
		d. Kerja Sama Eksternal (lanjutan)					
		1	ASEAN Plus Three (APT)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan
		2	East Asia Summit (EAS)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan
		3	ASEAN - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan
		4	ASEAN - Economic Cooperation Organization (ECO), ASEAN - Gulf Cooperation Council (GCC), ASEAN - Mercado Común del Sur/Common Market of the South (MERCOSUR), ASEAN - South Asia Association for Regional Cooperation (SAARC), ASEAN - Community of Latin American and Caribbean States (CELAC), ASEAN - Pacific Alliance (PA)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan

		5	Organisasi Regional dan Internasional lainnya	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan, kecuali masih dalam proses pembahasan/perundingan	Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN / Perwakilan
III. PERANGKAPAN ISO INTERNASIONAL							
	1	Aspek yang berkaitan dengan saling dukung pencalonan antara RI dengan negara sahabat pada Organisasi Internasional		Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Sekretariat Kerja Sama Multilateral / Perwakilan
	2	Lowongan Bekerja pada Organisasi Internasional		Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Sekretariat Kerja Sama Multilateral / Perwakilan
	3	Keamanan Internasional dan Perlucutan					
		a.	Kemampuan Internasional	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata / Perwakilan
			- Konflik antar - internal negara				
			- Pasukan Pemeliharaan				
			- Distribusi Keamanan				
		b.	Senjata Pemusnah Massal dan Senjata Konvensional	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata / Perwakilan
			- Senjata Nuklir				
			- Senjata Kimia				
			- Senjata Biologi				
			- Senjata Konvensional				
		c.	Pemanggulan Kejahatan Lintas Negara	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata / Perwakilan
			- Perdagangan Manusia				
			- Penyelundupan Manusia (people)				
			- Beli Prosees				
			- Narkoba				
			- UNCAC (United Nations)				
			- WML (W Crime (Kekalahan)				
			- IACA (International Anti)				
			- CCPCJ (Convention on Crime)				
			- UNODC (United Nations)				
		d.	Pemanggulan Terorisme	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata / Perwakilan

		<ul style="list-style-type: none">- Kerja Sama Penanggulangan Terorisme dalam Kerangka PBB				
		<ul style="list-style-type: none">- Kerja Sama Penanggulangan Terorisme di luar Kerangka PBB				
		<ul style="list-style-type: none">- Kerja Sama Kelembagaan dan Pengembangan Kapasitas				
	c.	Keramanan Siber	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Keramanan Internasional dan Perlucutan Senjata / Perwakilan
4 Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan						
	a.	Hak-hak sipil dan politik	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Hak Asasi Manusia & Kemanusiaan / Perwakilan
		<ul style="list-style-type: none">- Pemajuan hak-hak sipil dan politik				
		<ul style="list-style-type: none">- Perlindungan hak-hak sipil dan politik				
		<ul style="list-style-type: none">- Mekanisme hak-hak sipil dan politik				
	b.	Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dan pembangunan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Hak Asasi Manusia & Kemanusiaan / Perwakilan
		<ul style="list-style-type: none">- Pemajuan hak-hak ekonomi,				
		<ul style="list-style-type: none">- Perlindungan hak-hak ekonomi,				
		<ul style="list-style-type: none">- Mekanisme hak-hak ekonomi,				
	c.	Hak-hak kelompok rentan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Hak Asasi Manusia & Kemanusiaan / Perwakilan
		<ul style="list-style-type: none">- Hak Perempuan				
		<ul style="list-style-type: none">- Hak Anak				
		<ul style="list-style-type: none">- Hak Pekerja Migran				
		<ul style="list-style-type: none">- Hak-hak kelompok minoritas dan				
	d.	Kemanusiaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Hak Asasi Manusia & Kemanusiaan / Perwakilan
		<ul style="list-style-type: none">- Humaniter				
		<ul style="list-style-type: none">- Lembaga Bantuan Kemanusiaan				
		<ul style="list-style-type: none">- Penanganan Pengungsi dan				
		<ul style="list-style-type: none">- Daerah Kemanusiaan Konflik				
5 Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup						
	a.	Ekonomi dan Keuangan Internasional	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup / Perwakilan
		<ul style="list-style-type: none">- Organisasi Pembangunan Ekonomi PBB				

	a.	Perdagangan Barang, Pengembangan Industri dan Investasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Perdagangan Perindustrian Komoditas dan Kelayaan Intelektual/ Perwakilan
		<ul style="list-style-type: none">- Perdagangan barang nonperanian- Kerja sama pengembangan industri- Kawasan perdagangan bebas- Kerja sama investasi dan isu-isu baru World Trade Organization- Kerja sama pengembangan ekonomi kreatif- Kerja sama pengembangan ekonomi digital				
	b.	Perdagangan Jasa dan Fasilitas Perdagangan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Perdagangan Perindustrian Komoditas dan Kelayaan Intelektual/ Perwakilan
		<ul style="list-style-type: none">- Perdagangan Jasa dan E-Commerce- Kerja Sama Perdagangan- Akses World Trade Organization- Fasilitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kewirausahaan dan Peningkatan Kapasitas				
	c.	Pertanian dan Komoditi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Perdagangan Perindustrian Komoditas dan Kelayaan Intelektual/ Perwakilan
		<ul style="list-style-type: none">- Pertanian- Komoditi Pangan dan Perkebunan- Komoditi Kehutanan dan Perikanan- Komoditi Kelautan dan Dams Bersama Komoditi				
	d.	Standardisasi, Hak Kekayaan Intelektual dan Penyelesaian Sengketa	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Perdagangan Perindustrian Komoditas dan Kelayaan Intelektual/ Perwakilan
		<ul style="list-style-type: none">- Standardisasi Barang dan Jasa- Penyelesaian Sengketa dan Pengamanan Perdagangan- Peningkatan Hambatan Teknis Perdagangan- Hak Kekayaan Intelektual				
7	Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang					
	a.	Pembangunan Sosial, Badan-badan Khusus PBB dan Isu-isu Terkini	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang / Perwakilan
		<ul style="list-style-type: none">- Pembangunan Sosial- Badan-badan Khusus PBB- Demokratisasi dan Tata Pemerintahan- Isu-isu Sains dan Teknologi				

	b.	Sosial Budaya dan Lembaga Non Pemerintah	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang / Perwakilan
		- Kesehatan Global				
		- Pendidikan, Kebudayaan dan Kependidikan				
		- Ketenagakerjaan Internasional				
		- Lembaga antar negara dan Organisasi Internasional Non Pemerintah				
	c.	Organisasi Internasional Negara Berkembang I	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang / Perwakilan
		- Politik Organisasi Konferensi Islam				
		- Ekonomi, Sosial dan budaya Organisasi Konferensi Islam				
		- Politik Gerakan Non-Blok				
		- Ekonomi, Sosial dan Budaya Gerakan Non-Blok				
	d.	Organisasi Internasional Negara Berkembang II	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang / Perwakilan
		- Kelompok-77				
		- Kelompok-15				
		- Kelompok D-8				
		- Kerja Sama Selatan-selatan				
	8	Kemaggotaan Organisasi Internasional	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing satuan kerja / Perwakilan
	9	Bidang Majelis Umum Persekutuan Bangsa Bangsa (SMU PBB)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing satuan kerja / Perwakilan
	10	Bencana Global	Biasa/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Masing-masing satuan kerja / Perwakilan

	a. Bencana Alam				
	b. Pandemi				
IV. HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL					
1	Perumusan Norma Hukum Nasional dan Perjanjian Internasional	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional / Perwakilan
2	Perjanjian internasional meliputi pembuatan, pengelolaan, pelaksanaan, dan penyelesaian	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional / Perwakilan
	- Perjanjian internasional di bidang Politik dan Keamanan				
	- Perjanjian internasional di bidang Kewilayahan				
	- Perjanjian internasional di bidang Kelautan				
	- Perjanjian internasional di bidang Perdagangan, Jasa Ekonomi, Investasi, Keuangan, dan Lingkungan Hidup				
	- Perjanjian internasional di bidang Kerjasama Teknik, Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Ketenagakerjaan				
	- Dokumen Penyelesaian Sengketa				
	- Ruli Perera				
3	Advokasi Hukum dan Perjanjian Internasional	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional / Perwakilan
4	Publikasi dan sosialisasi perjanjian internasional	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional / Perwakilan
5	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional / Perwakilan
V. INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK					
1	Berkas penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup diplomasi publik	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Diplomasi Publik / Perwakilan
	- Bidang Politik				
	- Bidang Keamanan				
2	Berkas penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup diplomasi publik	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Diplomasi Publik / Perwakilan
	- Bidang Ekonomi				
	- Bidang Pembangunan				

3	Berkas penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup diplomasi publik di bidang : - Bidang Sosial - Bidang Budaya	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Diplomasi Publik / Perwakilan
4	Berkas Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup diplomasi publik dan isu-isu aktual dan strategis - Strategi Kewarganegaraan - Strategi Lokal	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Diplomasi Publik / Perwakilan
5	Berkas Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup diplomasi publik, pemberdayaan masyarakat Indonesia di Luar Negeri - Ekonomi - Inovasi dan teknologi - Sosial Budaya - Pendidikan - Pariwisata	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Diplomasi Publik / Perwakilan
6	Berkas Penyelenggaraan Museum Konferensi Asia Afrika - Publikasi dan Promosi Nilai-Nilai - Pelestarian dan Dokumentasi Diplomasi	Bebas/Terbuka	Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian dan Perwakilan	Museum Konferensi Asia Afrika / Perwakilan
7	Kerja Sama Pembangunan Internasional Penyelenggaraan hubungan luar negeri - Wilayah Asia dan Pasifik - Wilayah Amerika dan Eropa - Wilayah Afrika dan Timur Tengah - Organisasi Internasional	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Di Kerja Sama Pembangunan Internasional / Perwakilan
8	Pemberitaan a. Kebijakan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup pengelolaan informasi terkait pembantuan berta	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Informasi dan Media / Perwakilan
	b. Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup pengelolaan informasi di bidang : 1. Layanan Berita, Media Massa dan Transkrip 2. Dokumentasi Keistisan 3. Publikasi 4. Perancangan Multimedia dan Media Sosial	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Informasi dan Media / Perwakilan

		5	Monitoring Berita Media Asing dan Nasional				
	9	Berkas fasilitasi media asing dalam akreditasi Wartawan Asing	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Informasi dan Media / Perwakilan	
		b. Kerja Sama dengan Media	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Informasi dan Media / Perwakilan	
		c. Layanan Wartawan	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Informasi dan Media / Perwakilan	
	10	Berkas mengenai Pelayanan Informasi Publik	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Informasi dan Media / Perwakilan	
VI. KEAMANAN DIPLOMATIK							
	1	Berkas Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup keamanan diplomatik	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Dir. Keamanan Diplomatik / Perwakilan	
		a. Pemantauan Fintek					
		b. Penyamanan Informasi					
		c. Penyamanan Pemasok					
	2	Berkas Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kerja sama keamanan diplomatik	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Dir. Keamanan Diplomatik / Perwakilan	
		a. Kerja Sama Pengamanan Dalam Negeri					
		b. Kerja Sama Pengamanan Luar Negeri					
	3	Berkas penilaian organisasi kemasyarakatan asing	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Dir. Keamanan Diplomatik / Perwakilan	
	4	Berkas evaluasi Perwakilan Rerawan dan Perwakilan Berbahaya	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Dir. Keamanan Diplomatik / Perwakilan	
VII. PROTOKOL DAN KONSULER							
	1	Layanan Keprotokolan					

	a	Berkas Kunjungan Presiden dan Wakil Presiden ke luar Negeri	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Protokol / Perwakilan
	b	Pengaturan Acara Kemerdekaan dan Berkas Tamu Negara Asing	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Protokol / Perwakilan
		- Fasilitas Kedatangan dan Pengaturan Tata Tempat				
		- Pengaturan Tata Upacara				
		- Pengaturan Tata Penghormatan				
	c	Dukungan Keperwakilan Menteri Luar Negeri RI dan Wakil Menteri Luar Negeri RI di dalam dan di Luar Negeri	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Protokol / Perwakilan
		- Fasilitas Kedatangan dan Berkas Pengaturan Tata Tempat				
		- Berkas Pengaturan Tata Upacara				
		- Berkas Pengaturan Tata				
		- Berkas Jamuan				
	d	Upacara Diplomatik dan Tanda Jasa Kehormatan	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Protokol / Perwakilan
		1. Berkas Penerimaan Surat				
		2. Berkas Pengukuhan Tanda				
	e	Perwakilan Internasional dan Kerja Sama Antar Lembaga	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Protokol / Perwakilan
		- Berkas Pengaturan Tata Tempat				
		- Berkas Pengaturan Tata Upacara				
		- Berkas Pengaturan Tata				
	2	Layanan Konsuler				
	a	Layanan Paspor Diplomatik dan Dinas	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Konsuler / Perwakilan
		- Pembuatan dan Penerbitan				
		- Pemberian Izin ke Luar Negeri				
		- Penawaran Penjualan Paspor				
		- Rekomendasi visa Diplomatik				
	b	Layanan Visa Diplomatik dan Dinas	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Konsuler / Perwakilan
		- Permohonan dan Penerbitan Visa				
		- Permohonan dan Penerbitan Visa				

	c	Periklan Tanggal Diplomatik dan Dinas	Tertulis	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktori Konsuler / Perwakilan
		- Penerbitan Izin Tinggal				
		- Penerbitan Exit Permit Only				
		- Surat Penjaminan Pengurusan Izin				
		- Surat Penjaminan Pengurusan Izin				
	d	Perizinan Penerbangan, Pelayanan dan Legalisasi	Tertulis	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktori Konsuler / Perwakilan
		1 Perizinan Diplomatik Bagi				
		2 Penerbitan Exit Permit Only				
		3 Perizinan Diplomatik Bagi				
		4 Legalisasi Dokumen Asing yang				
	e	Jasa Konsuleran Warga Negara Asing	Tertulis	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktori Konsuler / Perwakilan
		1 Notifikasi Kebenaran Warga				
		2 Fasilitas Akses Kebenaran				
		3 Pembiayaan Biaya Data Kasus				
		4 Biaya Sisa Kebenaran				
	3	Facilities Diplomatic				
	a	Kendaraan Bermotor	Tertulis	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktori Fasilitas Diplomatik / Perwakilan
		- Perizinan Fasilitas Kendaraan				
		- Evaluasi Fasilitas Kendaraan				
	b	Perpajakan dan Pengendalian Asas Respon	Tertulis	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktori Fasilitas Diplomatik / Perwakilan
		- Fasilitas Perbaikan Bagi				
		- Evaluasi Fasilitas Perbaikan				
		- Data Fasilitas Berdasarkan Asas				
	c	Akreditasi dan Fasilitas Kunjungan Daerah	Tertulis	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktori Fasilitas Diplomatik / Perwakilan
		- Pemecatan Kartu Tanda Penerima				
		- Perizinan dan Pendampingan				
		- Pemberian Akreditasi Kantor				
	d	Perizinan Bangunan, Senjata Api dan Alat Komunikasi	Tertulis	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktori Fasilitas Diplomatik / Perwakilan
		- Perizinan dan Pengawasan				
		- Perizinan Penggunaan Pesawat				

	e	Herang Diplomatik dan Pas Bandara	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Fasilitas Diplomatik / Perwakilan
		- Pemakaian dan pemenuhan				
		- Pembebasan Kartu Kontrol untuk				
		- Pemberian Surat Rekomendasi				
	4	Perlindungan Warga Negara Indonesia				
	a	Penyelesaian Kasus Warga Negara Indonesia (WNI) di Luar Negeri	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia / Perwakilan
		1 Perlindungan diplomatik dan konsuler				
		2 Bantuan sosial				
		3 Bantuan hukum				
		4 Fasilitas layanan kesehatan dan				
		5 Bantuan penampungan				
	b	Kelengkapan dan Diplomasi Perlindungan	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia / Perwakilan
		1 Penyusunan Kebijakan dan				
		2 Kerja sama perlindungan WNI				
		3 Pemantauan dan evaluasi				
		4 Pelatihan dan kerjasama				
	c	Sistem dan Teknologi Informasi Pelayanan Konsuler dan Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI)	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia / Perwakilan
		1 Kerja sama pemanfaatan sistem				
		2 Lapsen Pengelolaan sistem pelayanan konsuler dan Perlindungan WNI				
	d	Berkas Penghargaan Hassan Wirajuda Perlindungan Award (HWPA)	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia / Perwakilan
VII. STRATEGI KEBIJAKAN LUAR NEGERI						
	1	Kebijakan Teknis Rencana dan Program	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri
		- Rencana dan Program Strategi Kebijakan				
		- Rencana Kegiatan/Rencana Kerja				
	2	Analisis dan Pemberian Rekomendasi Strategi Kebijakan	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri / Perwakilan
		- Tim Penyajian dan Penambahan				
		- Data Primer dan Tinjauan Pustaka				
		- Pengolahan Data				

		- Analisis Data				
		- Laporan Hasil Kajian/Pengembangan				
		- Rekomendasi Strategi Kebijakan				
3	Kerja Sama Kajian					
	a.	Berkas Kerja sama kajian dengan Universitas Dalam Negeri dan Luar Negeri	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri / Perwakilan
		- Perjanjian Kerja sama				
		- Hasil Kajian				
	b.	Berkas Kerja sama kajian dengan Lembaga Kajian Dalam Negeri dan Luar Negeri (ICWA) dan Lembaga Internasional	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri / Perwakilan
		- Perjanjian Kerja sama				
		- Hasil Kajian				
	c.	Berkas Kerja Sama Sinkronisasi Data Analisis	Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri / Perwakilan
		- Sinkronisasi Data Analisis				
		- Hasil Rekomendasi Strategi Kebijakan dan isu Khusus				
		- Hasil Penetapan Strategi Kebijakan				
4	Kertas Kerja Strategi Kebijakan dan Isu Khusus		Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri / Perwakilan
5	Publikasi dan Diseminasi Informasi		Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri / Perwakilan
		- Laporan Koordinasi				
		- Laporan Hasil Diseminasi				
		- Debriefing				
6	Laporan Pemantauan dan Evaluasi		Terbatas	Pejabat Administrator, Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Fungsional, Kepala Perwakilan	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan Perwakilan	Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri / Perwakilan

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,



RETNO L.P. MARSUDI

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN KLASIFIKASI AKSES ARSIP DINAMIS
KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

PENGAMANAN ARSIP DINAMIS BERDASARKAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN KLASIFIKASI AKSES ARSIP DINAMIS
KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

NO	TINGKAT KLASIFIKASI KEAMANAN	MEDIYA ARSIP					
		ARSIP KONVENSIONAL		SARANA PRASARANA	ARSIP	ARSIP ELEKTRONIK	SARANA PRASARANA
		ARSIP	PENGOLAH			PENGOLAH	
1	Tertutup/Bisa	Tidak ada persyaratan dan prosedur khusus	Pengguna Internal dan Eksternal yang mempunyai hak akses	a. Lemari arsip (filing cabinet) akan rak besi b. Penggunaan prosedur dan sarana disesuaikan dengan ruangan dan kondisi fisik arsip	1. Back up secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin keaslian Arsip 2. Arsip elektronik harus dilindungi terhadap penggunaan internal dan eksternal	Pengguna Internal dan Eksternal yang mempunyai hak akses dari pemilik otoritas sistem	1. Server dan sistem aplikasi yang memiliki autentikasi
2	Tertutup	Ada persyaratan dan prosedur dengan memberikan cap "TERBATAS" pada fisik Arsip	Pengguna Internal yang memiliki hak akses, Pengguna Eksternal, dan Aparat perangkat lunak sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Diperlukan tempat penyimpanan yang aman	1. Back up secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin keaslian Arsip 2. Arsip elektronik harus dilindungi terhadap penggunaan internal dan eksternal	1. Pengguna Internal yang memiliki hak akses 2. Pengguna eksternal dan aparat perangkat lunak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan akses dari pemilik otoritas sistem dan dokumen berdasarkan permohonan	1. Server dan sistem aplikasi yang memiliki autentikasi 2. Firewall dan Instruksi Protection System (IPS) 3. Arsip harus terenkripsi dan dilengkapi Disaster Recovery Center (DRC)
3	Rahasia	1. Ada persyaratan dan prosedur rahasia dengan memberikan cap "RAHASIA" pada fisik arsip 2. Tidak wibawakan melintaskan arsip/ dokumen rahasia	Dibatasi hanya untuk pemenuh kebijakan, pengawasan dan perangkat lunak	Lokasi aman dengan akses terbatas	1. Arsip secara real time untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin keaslian arsip 2. Arsip elektronik harus dilindungi terhadap penggunaan internal dan eksternal	1. Pengguna Internal yang memiliki hak akses 2. Pengguna eksternal dan aparat perangkat lunak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan akses dari pemilik otoritas sistem dan dokumen berdasarkan permohonan	1. Server dan sistem aplikasi yang memiliki autentikasi 2. Firewall dan Instruksi Protection System (IPS) 3. Arsip harus terenkripsi dan dilengkapi Disaster Recovery Center (DRC)
4	Sangat Rahasia	Ada persyaratan dan prosedur dengan memberikan cap "SANGAT RAHASIA" pada fisik arsip	Dibatasi hanya untuk pemenuh kebijakan, pengawasan dan perangkat lunak	1. Disimpan di zone yang sangat aman dengan pengawasan dan akses	1. Arsip secara real time untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin keaslian arsip	1. Pengguna Internal yang memiliki hak akses 2. Pengguna eksternal dan aparat perangkat lunak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan akses dari pemilik otoritas sistem dan dokumen berdasarkan permohonan	1. Server dan sistem aplikasi yang memiliki autentikasi 2. Firewall dan Instruksi Protection System (IPS) 3. Arsip harus terenkripsi dan dilengkapi Disaster Recovery Center (DRC)

[illegible]